



**KAMIS, 19 JULI 2018**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## Rp 304 Miliar Kerugian Negara Belum Kembali

**BENGKULU** - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bengkulu mencatat ada 7.915 rekomendasi hasil pemeriksaan periode 2014-2017 senilai Rp 619 miliar. Dari Rp 619 miliar itu yang sudah diselesaikan Rp 315 miliar. Artinya masih ada Rp 304 miliar lagi temuan yang belum diselesaikan.

Hasil pemeriksaan tersebut terdiri laporan keuangan dan kinerja pemerintah provinsi, pemkot dan pemkab. Ini disampaikan oleh Kepala Subauditorat Bengkulu I BPK Provinsi Bengkulu Acep Mulyadi, S.E., M.M.,

Ak dalam acara berdialog Kejaksanaan dengan Pemerintahan gelaran RBTv di Grage Hotel, kemarin (18/7).

"Dari 7.915 rekomendasi itu ada sekitar Rp 619 miliar totalnya. Tapi itu nggak semuanya kerugian negara karena ada juga sebagian hanya potensi. Yang sudah selesai Rp 315 miliar dan sisanya sudah ada yang nyicil untuk diselesaikan. Namun ada Rp 15 miliar dari beberapa temuan dari tahun 2014 sampai sekarang yang nggak diapa-apain sama sekali. Sudah bertahun-tahun temuan itu enggak diselesaikan," beber Acep.

Namun Acep tidak membeberkan secara rinci temuan itu, termasuk memberitahu apakah diantaranya ada yang sudah disidik/diusut oleh pihak aparat penegak hukum atau belum. Yang jelas ia mengatakan bahwa temuan itu merata di setiap OPD masing-masing pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Dalam kesempatan itu Acep mengingatkan beberapa pemda, terutama pemda yang mendapat opini wajar dengan pengecualian (WDP) untuk berbenah dan memperbaiki kelemahan-kelemahan selama ini.

"Masih ada beberapa kelemahan, khususnya pemda yang mendapat WDP. Kelemahan-kelemahan selalu jadi temuan dan itu sepertinya terjadi berulang-ulang," kata Acep.

Berdasarkan keterangan Acep bahwa temuan terbanyak saat ini bukan hanya di pelaksanaan, namun juga di perencanaan. "Temuan terbanyak sekarang di perencanaan. Kalau dulu banyak temuan di pelaksanaan saja. Ini karena saat melakukan perencanaan banyak yang dicopy paste, termasuk HPS," kata Acep.

*Baca RP 304 MILIAR.. Hal 19*



**KAMIS, 19 JULI 2018**

**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Sambungan dari hal 10**

Masih kata Acep, sekarang yang banyak bermasalah bukan hanya di proyek fisik saja tapi di proyek non fisik juga. "Ada yang bermain pada Spj. Misalnya ada toko yang berada di bawah tangga pemda. Masa iya belanjanya di toko itu setahun sampai Rp 3 miliar. Ada juga toko yang ternyata sudah tutup 5 tahun lalu tapi kuitansinya dan Spj nya masih di toko tersebut," beber Acep.

Dijelaskan Acep, BPK bukan men-

cari-cari kesalahan atau temuan. Karena BPK justru mengawal. "Kan sudah ada kontrak. Nah, kita hanya melihat benar atau tidak dilaksanakan sesuai dengan kontrak itu tadi. Yang tidak benar atau ada kesalahan baru kita angkat," jelas Acep.

Kajati Bengkulu Baginda Polin Lumban Gaol, SH, MH yang hadir di acara berdialog tersebut menyarankan pemprov, pemkot dan pemkab di Provinsi Bengkulu untuk sering-sering koordinasi dengan BPK dan BPKP. "Kami dalam melakukan penindakan itu cara

yang terakhir. Penanganan itu bisa dari laporan masyarakat atau dari temuan BPK. Jadi saran kami selain koordinasi dengan TP4D di kejaksaan, juga harus sering koordinasi juga dengan BPK dan BPKP," ujar Baginda.

Ia mengimbau kepada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu untuk mengembalikan kegirian negara dari hasil audit BPK. "Kalau ada

temuan dari BPK tolonglah dikembalikan dan lakukan langkah-langkah penyelesaian. Kami (Kejaksaan) selalu memberikan kesempatan kepada OPD-OPD tapi sayangnya sejauh ini saya lihat masih banyak OPD yang terkesan mengabaikan itu," kata Baginda.

Selain itu, Baginda juga menjelaskan bahwa penetapan penanganan perkara ke tingkat penyidikan sebenarnya dilakukan karena tidak ada itikad baik sama sekali dari OPD di pemerintahan terkait untuk menyelesaikan temuan BPK. "Imbauan saya, kalau ada temuan segeralah diselesaikan sebelum sampai ke tingkat penyidikan. Apalagi sampai penetapan tersangka. Penetapan tersangka itu sebenarnya adalah pil pahit bagi kami," kata Baginda.

Sementara itu, Plt Kadis PUPR Provinsi Bengkulu Oktaviano, ST, M.Si merasa sangat terbantu dengan adanya TP4D dari kejaksaan yang mendampingi pelaksanaan paket proyek sehingga semua pekerjaan bisa dilaksanakan dengan rasa nyaman.

"Kami merasa sangat nyaman dengan adanya TP4D. Pak Kajati pernah sampaikan ke saya bahwa pihak kejaksaan akan selalu siap mendampingi. WTP yang kita (pemprov) raih kemarin tidak lepas juga dari pendampingan dari pihak kejati sehingga serapan anggaran tahun 2017 sudah cukup maksimal. Kami berharap dari Kejati di tahun 2018 ini seluruh paket pekerjaan didampingi. Kalau tahun sebelumnya Cuma 13 paket yang didampingi," demikian Oktaviano. (tew)